

Analisis Tingkat Keuntungan, Keunggulan Kompetitif, Keunggulan Komparatif, dan Dampak Kebijakan Impor Pada Usaha Peternakan Sapi Potong di Provinsi Jawa Barat

(The analysis of profitability, comparative advantage, competitive advantage and import policy impact on beef cattle fattening in west java)

Dwi Yuzaria¹ dan Dadi Suryadi²

¹Staf Pengajar Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang

²Guru Besar Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Bandung

ABSTRACT The beef cattle fattening in Indonesia is financially and economically beneficial, even though the production process is in an economical condition with various trading policies with other countries. Those including the policies of import tariff and quota on input that are aimed to have a more expensive price of import input, hence giving the chance for domestic input to compete. These will be an advantage for domestic feedlotter, however the result of governmental policy are often far from expectation. Research conducted in West Java. This research used the survey method, with

multistage random sampling and analyzed by using the Policy Analysis Matrix model to measure the efficiency of the business performance of beef cattle fattening. Result of the research shows that beef cattle fattening reached financial and economical benefits. Feedlotter of local and imported cows in west Java has competitive advantage, local cows is more competitive than imported cows. Meanwhile efficiency indicator shows that feedlotter of imported cows has more comparative advantage compared to the feedlotter of local cow.

Key words: beef cattle, import policies, feedlotter, benefits, efficiency

2011 Agripet : Vol (11) No. 1: 32-38

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan impor bakalan pada dasarnya bertujuan untuk mendukung program swasembada daging nasional 2014. Untuk mencapai swasembada daging diperlukan upaya dan strategi pengembangan wilayah berdasarkan komoditas ternak unggulan, kelembagaan petani peternak, peningkatan usaha dan industri peternakan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, pengembangan kemitraan yang lebih luas dan saling menguntungkan, serta mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan (Sudrajat, 2003). Menurut Ilham (2006), seharusnya impor sapi bakalan hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dalam bentuk ternak sebagai sumberdaya. Dengan demikian sumberdaya yang ada dapat diperbaharui sehingga nilai tambah industri lebih banyak diperoleh di dalam negeri.

Mengalirnya impor bakalan sapi potong ke dalam negeri bermula dari dikeluarkannya kebijakan Mei 1995 tentang kesepakatan perdagangan internasional. Konsekuensinya pemerintah harus menurunkan tarif impor bakalan dari 5% menjadi tidak ada. Atas desakan IMF pada tahun 1998 melalui Inpres Nomor 2, pemerintah menghapuskan segala hambatan perdagangan internasional dengan alasan untuk meningkatkan daya saing, termasuk dalam perdagangan sapi potong. Implikasinya adalah terjadi peningkatan jumlah impor sapi yang sangat besar sampai saat ini (Ilham, 2006). Kebijakan ini diambil pemerintah dengan harapan akan meningkatkan jumlah populasi ternak lokal. Namun menurut Yusdja dan Ilham (2004) hanya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan peningkatan daya saing, Indonesia dapat mempunyai peluang untuk menjadi sumber sapi potong dunia, paling tidak untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Corresponding author: dwiuzaria@gmail.com

Jumlah dan nilai impor sapi dan daging sapi ini, terus mengalami peningkatan. Pasca krisis ekonomi (tahun 1998) jumlah impor daging sapi sebanyak 8.813,8 metrik ton menjadi 64.410 metrik ton pada tahun 2007. Pemerintah telah mengantisipasi pesatnya pertumbuhan impor dengan mengeluarkan kebijakan impor seiring dengan peraturan Ditjen Bina Produksi Peternakan (2002) yang menetapkan prosedur tetap Surat Persetujuan Pemasukan Sapi Bibit Bakalan (SPPSBB), sebagai pedoman bagi pelaku usaha bidang pemasukan ternak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular melalui lalu lintas pemasukan sapi bakalan dari luar negeri ke wilayah RI. Peraturan pemasukan sapi bakalan menentukan antara lain jumlah, jenis, berat maksimal dan negara asal sapi bakalan.

Di balik pesatnya impor sapi bakalan, sektor ini diduga telah menjadi penyebab tidak berkembangnya peternakan rakyat, padahal dengan adanya bakalan impor dapat menjadi pengendali terhadap pengurusan sapi lokal yang jumlahnya semakin menurun karena pemotongan yang tidak terkendali termasuk pemotongan sapi betina produktif. Di samping itu usaha penggemukan sapi bakalan impor mampu membantu para pengusaha kecil dan petani untuk memperoleh nilai tambah dan memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Selain itu, usaha ini memberikan pula efek ganda (*multiplying effect*) yang cukup luas, antara lain bisnis kulit, tulang, darah, lemak dan pupuk yang dihasilkan oleh sapi impor, serta sejumlah tenaga kerja yang dapat diserap, sehingga juga sebagai penyedia lapangan kerja (PSP IPB, 2003).

Impor sapi bakalan yang jumlahnya terlalu besar dapat berdampak negatif terhadap perkembangan produksi sapi potong Indonesia, baik secara ekonomi maupun dari sisi keamanan pangan bagi masyarakat (Yusdja, 2004). Perlu dilakukan penelitian apakah kebijakan impor yang dikeluarkan pemerintah dapat meningkatkan kinerja peternakan penggemukan di Jawa barat, mengingat Jawa Barat merupakan daerah terbanyak melakukan penggemukan sapi impor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keuntungan, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif dan dampak kebijakan impor pada usaha peternakan sapi potong di Provinsi Jawa Barat.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menitik-beratkan kajiannya pada kinerja usaha peternakan sapi potong, baik usaha peternakan sapi potong lokal maupun usaha peternakan sapi bakalan impor. Penetapan daerah penelitian di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara purposive karena daerah ini merupakan salah satu daerah konsumen daging terbesar dan merupakan daerah penggemukan sapi-sapi impor terbesar di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metoda survey, dengan memilih daerah sample dengan cara stratified random sampling. Sampel perusahaan penggemukan sapi bakalan impor diambil 4 perusahaan *feedloter*, yang dipilih secara acak dari 7 perusahaan yang masih aktif (jumlah perusahaan yang terdaftar 13 perusahaan importir).

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah rumah tangga peternak sapi potong lokal sebanyak 48.774 keluarga (Ditjennak, 2007). Pemilihan Kabupaten dengan kepadatan populasi ternak terbesar, minimal memiliki 18.000 ekor, dari kabupaten terpilih, diambil dekat ke sentra konsumen, baik DKI Jakarta maupun sentra konsumen lainnya. Berdasarkan tahapan di atas maka terpilih 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Sukabumi dan Kabupaten Bandung. Responden usaha penggemukan sapi potong rakyat dipilih 30 peternak secara acak di masing-masing Kabupaten. Sehingga dalam penelitian ini jumlah sampel variabel independen adalah sebanyak 184.

Pengukuran *Outcomes* Kebijakan Impor

Untuk menganalisis kinerja usaha penggemukan sapi yang dilihat dari efisiensi yang dapat menggambarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan tingkat keuntungan digunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Model ini dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau investasi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas pada aktivitas usahatani,

pengolahan dan pemasaran secara keseluruhan dengan sistematis. Tabel utama *Policy Analysis Matrix* (PAM) menurut Pearson *et al.* (2005) adalah seperti Tabel 1.

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM) Menurut Pearson dkk (2005)

| Uraian | Pendapatan | Biaya | | Keuntungan |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| | | Input Tradabel | Faktor Domestik | |
| Privat | A | B | C | D |
| Sosial | E | F | G | H |
| Divergensi | I | J | K | L |

Penghitungan dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, yaitu mulai dari input dan output yang keluar, nilai efisiensi ekonomi dan besarnya insentif investasi pemerintah, nilai keuntungan, efisiensi privat dan sosial, besarnya transfer input, transfer faktor, transfer bersih, transfer output di antara produsen, konsumen dan pedagang perantara dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil perhitungan *Policy Analysis Matrix* Usaha Penggemukan Sapi di Provinsi Jawa Barat

| Uraian | Revenue | Cost | | Profit |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| | | Tradable Input | Domestic Factor | |
| Komoditas Sapi Bakalan Lokal: | | | | |
| Private | 8.191.611 | 5.103.450 | 1.500.445 | 1.587.716 |
| Social | 6.804.989 | 4.221.789 | 1.389.306 | 1.193.894 |
| Divergence | 1.386.622 | 881.661 | 111.139 | 393.822 |
| Komoditas Sapi Bakalan Impor: | | | | |
| Private | 9.503.000 | 8.092.355 | 386.677 | 1.023.968 |
| Social | 7.872.500 | 6.215.855 | 291.726 | 1.364.919 |
| Divergence | 1.630.500 | 1.876.500 | 94.951 | -340.951 |

Keuntungan

a. Private Profitability

Private Profitability merupakan indikator daya saing (*competitiveness*) dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan yang ada (Pearson *et al.*, 2005). Nilai *Private Profitability* usaha penggemukan (lokal dan impor) masing-masing > 0 , menunjukkan

bahwa usaha penggemukan memiliki daya saing pada tingkat harga pasar aktual (*actual market prices*) atau harga sesungguhnya yang diterima dan dibayar peternak. Peternak memperoleh profit di tingkat harga pasar/aktual dan mampu berekspansi.

Fakta tersebut menginformasikan bahwa kedua usaha penggemukan sapi memiliki daya saing karena adanya kebijakan pemerintah, dengan indikator *return to investment* yang lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) pada tingkat penggunaan teknologi, harga dan kebijakan yang berlaku saat ini. Nilai *private profitability* lokal lebih besar dari *private profitability* impor. Artinya, dengan kebijakan yang ada usaha penggemukan bakalan lokal memiliki daya saing yang lebih baik dan dapat berkembang seperti usaha penggemukan bakalan impor.

b. Social Profitability

Social Profitability atau keuntungan sosial merupakan indikator efisiensi (*efficiency*) sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan (Pearson *et al.*, 2005). Nilai *social profitability* usaha penggemukan bakalan lokal dan impor > 0 . Artinya, usaha penggemukan sapi (lokal dan impor) sudah efisien pada tingkat harga sosial (harga yang akan menghasilkan alokasi terbaik dari sumberdaya dan dengan sendirinya menghasilkan pendapatan tertinggi). Implikasinya usaha penggemukan sapi (lokal dan impor) sudah menggunakan atau mengalokasikan sumberdaya secara efisien. Usaha penggemukan bakalan lokal dan bakalan impor secara sosial menguntungkan. Namun, nilai *social profitability* usaha penggemukan bakalan impor lebih besar dari penggemukan bakalan lokal. Artinya, tanpa kebijakan, usaha penggemukan bakalan impor lebih efisien dibandingkan penggemukan bakalan lokal. Jika tidak ada kebijakan maka usaha penggemukan bakalan impor lebih berkembang dibandingkan dengan usaha penggemukan bakalan lokal.

Efisiensi Finansial dan Ekonomi

a. Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*)

Indikator keunggulan kompetitif adalah *Private Cost Ratio* (PCR) yang

mencerminkan berapa banyak sistem usaha penggemukan dapat membayar input faktor domestik (sewa lahan, upah tenaga kerja dan bunga modal) dan tetap dalam kondisi kompetitif. Usaha penggemukan sapi (lokal dan impor) masing-masing memiliki nilai PCR < 1, yang bermakna memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Usaha penggemukan bakalan lokal memiliki nilai PCR sebesar 0,49, lebih besar dari usaha penggemukan bakalan impor (0,27). Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah usaha penggemukan sapi bakalan lokal diperlukan tambahan biaya input faktor domestik sebesar 0,49 unit dalam nilai privat, dan usaha penggemukan bakalan impor memerlukan tambahan biaya input faktor domestik sebesar 0,27 unit dalam nilai privat.

Rendahnya nilai PCR bakalan impor mengindikasikan bahwa usaha penggemukan bakalan impor memiliki profit maksimum karena mampu membiayai faktor domestik pada harga *private* atau efisien secara finansial. PCR dapat diminimumkan dengan cara menekan biaya input faktor domestik dan input *tradable* atau memaksimalkan nilai tambah output (Tawaf, 2009). Penggunaan nilai PCR memperlihatkan besarnya komposisi input faktor domestik terhadap nilai tambah output dan biaya input tradabel, dengan tanpa mengurangi keuntungan. Karena PCR dinilai dalam harga privat yang sudah dipengaruhi kebijakan pemerintah.

b. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Dalam proses produksi sebagian usaha menggunakan sumberdaya dalam negeri dan sebagian lagi tetap menggunakan bahan dari luar negeri. Apakah penggunaan sumberdaya domestik tersebut menguntungkan atau tidak, dapat dianalisis dengan *Domestic Resource Cost* (DRC). DRC merupakan rasio antara biaya input faktor domestik dengan nilai tambah output dari biaya input *tradable* yang dinilai pada harga sosial. Nilai DRC merupakan indikator kemampuan usaha penggemukan sapi bakalan (lokal dan impor) untuk membiayai biaya input faktor domestiknya pada harga sosial atau dikenal

sebagai indikator keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Usaha penggemukan sapi bakalan (lokal dan impor) masing-masing memiliki nilai DRC < 1, yang bermakna bahwa komoditas bakalan (lokal dan impor) memiliki keunggulan komparatif, semakin efisien dan mampu hidup tanpa bantuan atau intervensi pemerintah serta mempunyai peluang untuk ekspor.

Nilai koefisien DRC pada usaha penggemukan bakalan lokal sebesar 0,54 dan penggemukan bakalan impor 0,18. Nilai DRC tersebut mempunyai arti bahwa untuk menghasilkan Rp 100 nilai tambah pada usaha penggemukan bakalan lokal dibutuhkan Rp 54 sumber daya faktor domestik dan pada bakalan impor Rp 18. Jadi sumberdaya faktor domestik yang harus dikorbankan untuk menghemat atau memperoleh devisa dari kegiatan usaha penggemukan sapi bakalan lokal lebih kecil dari sumberdaya domestik yang bersedia dikorbankan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha penggemukan bakalan lokal dan bakalan impor efisien secara ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya faktor domestik.

Dampak Kebijakan Impor Terhadap Output

a. Output Transfer

Transfer output merupakan selisih antara penerimaan pada harga privat dengan penerimaan pada harga sosial, menunjukkan adanya kebijakan pemerintah diterapkan pada komoditas sapi bakalan lokal dan bakalan impor, sehingga membuat harga domestik berbeda dengan harga dunia. Hasil penelitian, memperlihatkan nilai transfer output yang positif. Artinya, terjadi transfer dari konsumen kepada produsen. Konsumen membeli komoditas sapi bakalan lokal dan impor dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, dan produsen menerima harga komoditas sapi bakalan lokal dan impor dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya, yaitu sebesar Rp 1.386.622 dan Rp 1.630.500 lebih besar daripada seharusnya, tanpa adanya kebijakan pemerintah.

b. Nominal Protection Coefficient on Tradable Output (NPCO)

NPCO adalah indikator dampak kebijakan yang menunjukkan seberapa besar harga sapi lokal dan sapi impor (harga privat) berbeda dengan harga sosial (harga dunia). NPCO usaha penggemukan bakalan lokal dan impor masing-masing memiliki nilai > 1 , yaitu sebesar 1,20 untuk usaha penggemukan sapi lokal dan 1,21 sapi impor. Artinya, usaha penggemukan sapi bakalan lokal dan impor menerima *revenue* masing-masing 20 % dan 21% lebih besar dari yang seharusnya apabila tidak ada kebijakan pajak impor.

Menurut Ellis (1992) dampak intervensi kebijakan pajak impor berdasarkan dampak kesejahteraan (*welfare effects*) adalah *producer surplus loss* dan *tax revenue gain* serta *net welfare loss*. Hasil analisis – berdasarkan konsep surplus konsumen dan produsen – menunjukkan bahwa dampak kebijakan pajak impor sapi memberi keuntungan kepada pemerintah berupa pajak sebagai pendapatan negara dan *resources saved*, namun berdampak menurunkan pendapatan peternak sapi bakalan impor, dan pada akhirnya secara keseluruhan akan merugikan (*deadweight efficiency loss*).

c. Domestic Factor Transfer

Tradeable input transfer adalah selisih antara biaya input tradabel pada harga privat dengan biaya input pada harga sosial, yang menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi potong menghasilkan nilai transfer input *tradable* yang positif, artinya terjadi transfer (insentif) dari produsen (peternak) kepada pemerintah melalui penerapan kebijakan impor. Peternak membayar sapi bakalan dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Akan tetapi ada kebijakan pemerintah yang melindungi produsen (peternak sapi bakalan lokal dan impor) pada input faktor domestik dengan pemberian subsidi. Usaha penggemukan bakalan lokal membayar input faktor domestik sebesar Rp 111.140 lebih kecil daripada seharusnya. Sedangkan usaha penggemukan bakalan impor membayar input

faktor domestik sebesar Rp 94.951 lebih kecil daripada seharusnya atau dengan kata lain usaha penggemukan sapi bakalan impor membayar input faktor domestik Rp 94.951 lebih kecil daripada tanpa ada kebijakan pemerintah.

Dampak Kebijakan Impor Terhadap Input

a. Tradeable Input Transfer

Tradeable input transfer adalah selisih antara biaya input tradabel pada harga privat dengan pada harga sosial, menunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input tradabel. Usaha penggemukan bakalan lokal dan impor membayar input tradabel Rp 881.661 dan Rp 1.876.500 lebih kecil daripada seharusnya tanpa ada kebijakan pemerintah.

b. Nominal Protection Coefficient on Input (NPCI)

NPCI merupakan rasio antara biaya input *tradable* pada harga privat dengan pada harga sosial, menunjukkan dampak kebijakan yang menyebabkan divergensi antara harga privat dan harga sosial. Usaha penggemukan bakalan lokal dan impor memiliki nilai NPCI > 1 , masing-masing 1,21 dan 1,30, yang bermakna bahwa pemerintah menaikkan harga input tradabel pada pasar domestik di atas harga dunia sebesar 21% dan 30%. Implikasinya usaha penggemukan dirugikan dengan tingginya harga beli input *tradable* tersebut. Hal ini juga berdampak pada pasar output, menyebabkan penurunan kesejahteraan, berdasarkan transfer uang yang berhubungan dengan posisi pendapatan dari produsen yaitu *consumer surplus loss*, *producer surplus loss*, *tax revenue gain* dan *net welfare loss* (Ellis, 1992).

Dampak intervensi kebijakan pajak input berdasarkan transfer sumberdaya (*resources transfers*) adalah *extra resources used*, *foreign exchange saving* dan *deadweight efficiency loss* (Ellis, 1992). Pada penelitian ini, kebijakan input mempengaruhi transfer sumberdaya (*resource transfer*) yaitu penggunaan sumberdaya (sapi bakalan) yang berlebihan, namun terjadi penghematan *foreign exchange*, tetapi pada akhirnya tetap terjadi *deadweight efficiency loss*.

c. *Domestic Factor Transfer*

Domestic Factor Transfer menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosial yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor domestik (sewa lahan, upah tenaga kerja dan bunga modal). Nilai transfer faktor domestik > 1 menunjukkan adanya kebijakan pemerintah terhadap produsen dan konsumen yang berbeda dengan kebijakan pada input tradabel. Pada hasil penelitian ditemukan nilai DFT usaha penggemukan bakalan lokal dan impor > 1 . Artinya, dengan adanya kebijakan pemerintah mengakibatkan peternak sapi bakalan lokal dan impor membayar sewa lahan, upah tenaga kerja dan bunga modal dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya, yakni masing-masing Rp 111.139 dan Rp 94.951 lebih kecil dari seharusnya tanpa ada kebijakan pemerintah.

Dampak Kebijakan Impor - Input-Output

a. *Effective Protection Coefficient (EPC)*

EPC merupakan analisis gabungan antara *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) dengan *Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI). Nilai EPC menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah bersifat melindungi atau menghambat produksi domestik secara efektif. Nilai EPC usaha penggemukan sapi bakalan lokal > 1 , menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melindungi produsen domestik (peternak bakalan lokal) dan berjalan secara efektif. Sesuai dengan hasil penelitian Tawaf (2009) bahwa kebijakan pemerintah telah menguntungkan peternakan rakyat. Artinya, kebijakan pemerintah menaikkan harga output atau input yang diperdagangkan di atas harga efisiensinya, dengan membebani pajak kepada peternak sapi bakalan impor. Nilai EPC usaha penggemukan (sapi bakalan impor) adalah 0,85. Artinya, secara keseluruhan peternak sapi bakalan impor tidak diproteksi.

b. *Net Transfer*

Net transfer merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen (peternakan sapi bakalan lokal dan impor) dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai *net transfer* usaha penggemukan bakalan

lokal adalah 393.821, menunjukkan ada surplus konsumen pada sapi potong lokal. *Net transfer* usaha penggemukan sapi bakalan impor adalah -340,951, menunjukkan pengurangan surplus produsen (peternak sapi bakalan impor) yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output.

c. *Profitability Coefficient*

Profitability Coefficient (PC) adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosial. Koefisien keuntungan merupakan indikator yang lebih lengkap dibandingkan dengan *Effective Protection Coefficient* (EPC), yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan pemerintah (harga output, harga input dan faktor domestik) dan oleh karenanya merupakan proteksi dari transfer kebijakan bersih (*net policy transfer*). PC bakalan lokal > 1 yaitu sebesar 1,33, menunjukkan kebijakan pemerintah menyebabkan keuntungan yang diterima peternak lokal lebih besar (33%). Sedangkan PC usaha penggemukan bakalan impor < 1 yaitu sebesar 0,75, menunjukkan kebijakan pemerintah (pajak impor) menyebabkan keuntungan yang diterima produsen 25% lebih rendah dari tanpa kebijakan.

d. *Subsidy Ratio to Producers (SRP)*

SRP menunjukkan proporsi dari penerimaan total pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi yang digunakan sebagai satu-satunya kebijakan untuk menggantikan seluruh kebijakan komoditas dan ekonomi makro, maka SRP memungkinkan untuk membuat perbandingan antara besarnya subsidi perekonomian bagi sistem komoditas pertanian.

Hasil penelitian *SRP* usaha penggemukan bakalan lokal positif yaitu 0,06. Artinya, transfer bersih sebesar 6 persen dari tarif impor untuk peternak lokal. Sedangkan usaha penggemukan bakalan impor bernilai yang negatif yaitu -0,04, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan peternak sapi bakalan impor mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari *opportunity cost* nya.

KESIMPULAN

- a. Usaha penggemukan sapi potong rakyat yang menggemukan sapi bakalan lokal dan feedloter yang menggemukkan sapi bakalan impor memperoleh keuntungan finansial dan ekonomi serta memiliki keunggulan kompetitif. Usaha penggemukan sapi bakalan lokal lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha penggemukan sapi bakalan impor.
- b. Usaha penggemukan sapi bakalan impor dilihat dari indikator efisiensi memiliki keunggulan komparatif dibanding usaha penggemukan sapi bakalan lokal.
- c. Usaha penggemukan sapi bakalan lokal menerima surplus produsen sebagai akibat adanya kebijakan impor. Sementara usaha penggemukan sapi bakalan impor mengalami penurunan surplus akibat kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, 2002. Statistik Peternakan Indonesia. Jakarta.
- Ditjennak, 2007. Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional 2007. Uraian Hasil dan Analisis Hasil. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Ellis, F., 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, School of Development Studies University of East Anglia, Cambridge.
- Ilham, N., YUSDJA, Y., 2004. Tinjauan kebijakan pengembangan agribisnis sapi potong. J. AKP. 2(2).
- Ilham, N., 2006. Analisis sosial ekonomi dan strategi pencapaian swasembada daging 2010. J. AKP. 4(2).
- Pearson, S., Gotsch, C., Syaiful Bahri, 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor, 2003. Dampak Impor Sapi Bakalan. Laporan Penelitian. Institut Pertanian Bogor.
- Sudarjat, S., 2003. Operasionalisasi program terobosan menuju kecukupan daging sapi tahun 2005. J. AKP. 1(1) : 23-45.
- Tawaf, R., 2009. Respons Usaha Penggemukkan Sapi Potong Terhadap Perubahan Mekanisme Pasar Daging Sapi Pada Kondisi Daya Dukung Wilayah dan Kebijakan Pemerintah di Jawa Barat. Disertasi Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- YUSDJA, Y., Rosmijati S., Bambang W., Ikin S., Chaerul K., 2004. Pemantapan program dan strategi kebijakan peningkatan produksi daging sapi. J. AKP. 2(1).